

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari kejadian lampau. Pemerintah ataupun masyarakat akan memperoleh manfaat ekonomi dan sosial dari aset yang telah dikelola. Aset yang baik adalah aset yang dapat diukur dalam satuan uang. Segala sumber daya nonkeuangan yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat umum dan sumber-sumber daya tertentu yang masih ada sampai saat ini sebagai budaya dan sejarah, apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku maka dapat termasuk sebagai aset. (PP No 71, 2010).

Aset tetap merupakan salah satu macam-macam aset dimana aset tetap ini harus berwujud dengan masa manfaat ekonomi lebih dari 12 bulan agar dapat dipergunakan untuk kegiatan pemerintahan dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, aset tetap termasuk dalam investasi yang cukup besar dalam jumlah keseluruhan aset. Besarnya investasi yang terdapat dalam aset tetap menjadikan aset tetap itu memerlukan perhatian yang lebih serius. Bukan hanya pada penggunaan dan operasinya saja tetapi juga dalam akuntansinya yang mencakup perolehan aset tetap, penghentian atau pelepasan aset tetap, serta penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan (Rahmasari, 2017).

Kemudian, aset tetap diklasifikasikan menjadi enam bagian berdasarkan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasional entitas, yaitu tanah, peralatan dan

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lain.

Menurut penelitian, aset tetap mempunyai peran penting dalam hal berjalannya kegiatan operasional yang dilakukan oleh pemerintah baik kementerian di tingkat pusat sampai dengan unit vertikal (Andy & Nur, 2014). Pemerintah melakukan kegiatan operasionalnya di kantor, yaitu sebuah tempat terjadinya aktivitas/kegiatan dalam pemerintahan daerah setempat dalam menjalani kewajibannya berupa pelayanan kepada masyarakat. Salah satu fasilitas yang dimiliki oleh kantor adalah aset tetap berupa peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang memiliki nilai signifikan dan dalam kondisi siap digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa peralatan dan mesin sangat berperan penting dalam aktivitas para pegawai dalam melakukan kegiatan operasional.

Pengelolaan aset tetap pada setiap entitas akuntansi sangat penting karena aset tetap tersebut mempunyai pengaruh dan nilai yang signifikan terhadap laporan keuangan di bagian neraca. Terkhususnya pengelolaan aset tetap berupa peralatan dan mesin, pengelolaan yang baik dan benar akan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi. Selain itu, hal ini menjadi salah satu poin penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan instansi. Salah satu tugas BPK sebagai lembaga negara yaitu bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengecek apakah pengelola keuangan negara telah mengelola keuangan negara dengan baik dan telah memenuhi tanggung jawabnya. Sejak pembaruan, tahun 2004 sampai dengan 2008, penyajian Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat mendapatkan opini *disclaimer* dari BPK. Pemerintah Pusat terus berupaya mengembangkan Laporan Keuangannya menjadi lebih baik dan berkualitas sehingga tahun 2009 sampai 2015 opini tersebut berhasil meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada akhirnya Pemerintah Pusat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk pertama kali pada tahun 2016. Hingga tahun anggaran 2020, Pemerintah Pusat mempertahankan opini WTP tersebut.

Akan tetapi, masih banyak ditemukan beberapa permasalahan pengelolaan aset tetap di Kementerian/Lembaga. Berdasarkan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I oleh BPK tahun 2020, terdapat 77 Kementerian/Lembaga yang penerapan akuntansi aset tetapnya belum terpenuhi. Tidak hanya itu, terdapat 57 Kementerian/Lembaga yang dimana aset tetapnya bersaldo minus sebesar Rp10,62 triliun, 24 Kementerian/Lembaga sebesar Rp22,41 triliun aset tetapnya tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dan 23 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,07 triliun aset tetapnya dikuasai oleh pihak lain (Badan Pemeriksa Keuangan R. I., 2020). Kemudian, ditemukan pula aset tetap yang keberadaannya tidak diketahui bahkan dikendalikan oleh pihak lain, hal ini terjadi pada 18 Kementerian/Lembaga. Contohnya adalah aset tetap Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp63,80 miliar aset tetapnya tidak terdeteksi keberadaannya, antara lain 321 unit sepeda motor, 208 unit peralatan dan mesin lainnya, serta peralatan dan mesin yang akan diberikan ke masyarakat setempat (Badan Pemeriksa Keuangan R. I., 2020).

Permasalahan ini menimbulkan dampak negatif terhadap laporan keuangan. Salah satu contohnya yaitu saldo aset tetap pada neraca dan beban penyusutan pada Laporan Operasional yang tidak menunjukkan nilai yang sesungguhnya, keamanannya pun kurang meyakinkan sehingga kurang bisa dimanfaatkan untuk memanggul operasional K/L. Salah satu alasan hal ini bisa terjadi adalah terdapat ketidaksesuaian penerapan akuntansi terhadap aset tetap pada instansi yang bersangkutan. Selain itu, beberapa entitas melupakan hal yang tak kalah pentingnya yaitu melaksanakan pengawasan di aplikasi SIMAK BMN dalam proses mengelola aset tetap agar lebih memadai.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk meninjau atas penerapan akuntansi aset tetap berupa peralatan dan mesin pada Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau apakah telah sesuai atau belum terhadap Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku demi meningkatkan kualitas LKPP dan pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, penulis mengambil judul Karya Tulis Tugas Akhir “Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berupa Peralatan dan Mesin pada Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau Tahun 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran aset tetap peralatan dan mesin pada Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau TA 2020?
2. Bagaimana metode penyusutan aset tetap peralatan dan mesin pada Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau TA 2020?

3. Bagaimana penyajian dan pengungkapan aset tetap peralatan dan mesin pada Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau TA 2020?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun sasaran yang ingin diraih oleh penulis pada penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang penerapan klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran aset tetap peralatan dan mesin pada Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau TA 2020.
2. Untuk meninjau metode penyusutan aset tetap peralatan dan mesin Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau TA 2020.
3. Untuk meninjau tentang penyajian dan pengungkapan aset tetap peralatan dan mesin pada Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau TA 2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada penelitian ini penulis melakukan tinjauan penerapan akuntansi aset tetap berupa peralatan dan mesin pada Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau tahun anggaran 2020. Pembahasan mengenai penerapan akuntansi aset tetap berupa peralatan dan mesin meliputi klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan di Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau Tahun 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bukan hanya bagi penulis melainkan bagi para pihak, baik secara teoritis maupun praktiknya, antara lain:

1. Dapat menerapkan ilmu yang didapatkan penulis semasa kuliah dan untuk menambah serta memperdalam pengetahuan penulis mengenai segala hal yang berkaitan dengan penerapan akuntansi aset tetap berupa peralatan dan mesin dalam praktik sebenarnya.
2. Dapat meninjau kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap berupa peralatan dan mesin di Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau terhadap standar akuntansi pemerintah yang berlaku.
3. Dapat mendukung perkembangan implementasi praktik akuntansi aset tetap berupa peralatan dan mesin di Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau ke arah yang lebih baik.
4. Dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca terkait akuntansi aset tetap berupa peralatan dan mesin dalam praktik sebenarnya
5. Dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi peneliti selanjutnya atau para pembaca yang ingin melakukan penelitian mengenai akuntansi aset tetap berupa peralatan dan mesin.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjabarkan tentang gambaran umum mengenai karya tulis yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan memaparkan landasan teori seperti definisi aset tetap, klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap peralatan dan mesin, pengukuran aset tetap peralatan dan mesin, penyusutan aset tetap peralatan dan mesin, penyajian dan pengungkapan aset tetap peralatan dan mesin yang digunakan sebagai dasar dalam meninjau penerapan akuntansi aset tetap khususnya peralatan dan mesin pada objek karya tulis ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metode pengumpulan data, gambaran umum objek tinjauan, dan pembahasan hasil. Gambaran objek yang dimaksud mencakup profil kantor, visi dan misi, tugas dan fungsi organisasi, serta struktur organisasi. Adapun pembahasan hasil dikelompokkan menjadi klasifikasi aset tetap peralatan dan mesin, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penyajian dan pengungkapan berupa peralatan dan mesin pada objek penelitian.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis akan memberikan simpulan yang berisi opini yang dimiliki penulis atas tinjauan penerapan akuntansi aset tetap berupa peralatan dan

mesin pada Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau berdasarkan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Simpulan ini diharapkan mampu memberikan hasil yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Akuntansi Pemerintah dan memberikan informasi bagi para pembaca.